

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor produksi yang memainkan peran penting dalam suatu perekonomian adalah manusia (*human capital*), karena manusia memiliki ciri khas yang sangat substantif dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. *Human capital* yang pada hakikatnya mempunyai perbedaan secara substansial tersebut sangat terlihat ketika menempatkan manusia sebagai tenaga kerja yang menggerakkan roda perekonomian atau dengan kata lain menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain.

Human capital yang di dalamnya mewakili pengetahuan dan keterampilan manusia baik yang diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal lainnya akan menjadi penentu produktivitas karena memungkinkan tenaga kerja (manusia) untuk bisa bekerja secara efektif.

Produktivitas tenaga kerja merupakan kunci untuk pembangunan ekonomi artinya peningkatan dalam produktivitas mampu mendorong produksi barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak karena dilakukan oleh tenaga kerja. Peningkatan produksi tersebut menciptakan harga menjadi murah, bermanfaat bagi konsumen, perusahaan tempat bekerja menjadi produktif dan lebih kompetitif, meningkatkan total pendapatan. Dan tenaga kerja yang produktif menghasilkan lebih banyak keuntungan dan harus mengarah pada pengurangan kemiskinan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih *sustainable* (berkelanjutan).

Produktivitas masih menjadi masalah yang sangat krusial dan dihadapi oleh banyak negara di dunia tidak terkecuali Indonesia sehingga masalah ini mendapat perhatian khusus. Kemajuan dan tingkat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari produktivitas yang tinggi. Disisi lain, memiliki angkata kerja yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin mempunyai produktivitas kerja yang baik.

Masalah ketenagakerjaan menjadi isu sentral dalam pembangunan ketenagakerjaan didominasi oleh kemampuan tenaga kerja yang masih kurang memadai baik dari segi pendidikan, pengalaman kerja dan yang lainnya sehingga memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur. Melalui kebijakan itu, pihak perusahaan diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan secara internal melalui pemberdayaan tenaga kerja (Firmansyah, 2015).

Produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada daya saing suatu negara atau daerah. Arham (2020) menyebut bahwa daya saing Indonesia menjadi relatif masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand berdasarkan laporan terbaru mengenai daya saing global yang disusun *World Economic Forum* (WEF). Daya saing yang lemah sebagai efek dari produktivitas tenaga kerja yang belum kompetitif, salah satu penyebabnya karena tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Tenaga kerja ini juga dominan bekerja di sektor non produktif, akibatnya pendapatan tenaga kerja Indonesia masih rendah.

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam

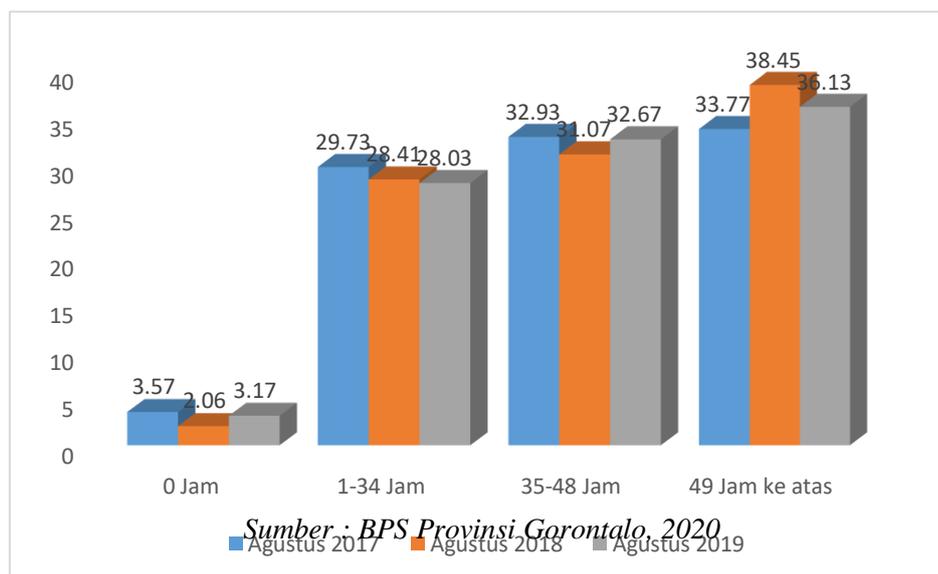
proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, dan sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intensive*) dan sektor padat modal (*capital intensive*). (BPS, 2019)

Dalam studi yang dilakukan oleh Dua dan Gard (2019) tentang determinan produktivitas tenaga kerja di negara berkembang dan maju di Asia Pacific menemukan bahwa penanaman modal, modal manusia, teknologi kualitas kelembagaan, dan variabel makroekonomi seperti kemampuan pemerintah dan keterbukaan menjadi penentu signifikan dari produktivitas tenaga kerja negara berkembang dan negara maju yang ada di Asia Pasifik.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang juga mengalami masalah dengan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Gorontalo tahun 2018, IPK Provinsi Gorontalo sebesar 59,98. Angka itu menempatkan Gorontalo pada kategori “menengah bawah”, atau peringkat 21 dari 34 provinsi. Nilai tersebut meningkat 10,54 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 49,44 atau berada di peringkat 27 dari 34 provinsi. Namun di akhir tahun 2019 terjadi penurunan cukup tajam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tersebut menjadi 48,64.¹

¹ Data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, 2019.

Namun demikian, produktivitas juga berkaitan dengan jumlah jam kerja. Hasil Sakernas Agustus 2017 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja 1-34 jam seminggu sebesar 29,73 persen dari total pekerja, tahun 2018 turun menjadi 28,41 persen dan tahun 2019 menurun lagi menjadi 28,03 persen. Penduduk Gorontalo bekerja di atas 35 jam per minggu ditahun 2017 sebesar 32,93 persen menurun di tahun 2018 yang hanya 31,07 persen dan meningkat menjadi 32,67 persen di tahun 2019. Penduduk yang bekerja lebih dari 49 jam seminggu di tahun 2017 sebesar 33,77 persen, naik menjadi 38,45 persen di tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 36,13 persen di akhir tahun 2019. Grafik berikut menggambarkan persentase jumlah pekerja yang bekerja menurut jumlah jam kerja yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.



Gambar 1.1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2017-2019

Pada Agustus 2019, secara umum lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai

39,90 persen. Sedangkan persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 26,12 persen.

Hasil Sakernas periode Agustus 2017- Agustus 2019 juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam distribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan selama periode tersebut. Angkatan kerja pada tahun 2019 sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya berpendidikan dasar ke bawah yaitu sebesar 61,53 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan pendidikan menengah sebesar 24,51 persen, sementara untuk tamatan pendidikan tinggi 13,96 persen. Pola yang sama juga terjadi pada periode Agustus 2017 dan Agustus 2018.

Tabel 1.1. Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017-2019

Jenjang Pendidikan	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
< SD (Tidak Tamat SD;Belum/Tidak Pernah Sekolah)	25,09	26,91	24,54
Laki-laki	28,44	29,57	27,02
Perempuan	19,2	22,62	20,38
Perkotaan	17,87	18,13	16,91
Pedesaan	29,92	32,8	30,21
Pendidikan Dasar (SD-SMP/Sederajat)	41,1	37,97	36,99
Laki-laki	42	38,84	39,43
Perempuan	39,52	36,57	32,91
Perkotaan	32,63	32,3	31,46
Pedesaan	46,77	41,78	41,1
Pendidikan Menengah (SMA-Sederajat)	21,9	22,86	24,51
Laki-laki	22,5	24,38	25,07
Perempuan	20,84	20,4	23,57
Perkotaan	31,08	31,02	31,06
Pedesaan	15,75	17,38	19,64
Pendidikan Tinggi (Diploma - Sarjana)	11,91	12,26	13,96
Laki-laki	7,06	7,21	8,48
Perempuan	20,44	20,41	23,14
Perkotaan	18,41	18,55	20,56
Pedesaan	7,56	8,04	9,05

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Pada jenjang pendidikan menengah ke atas terlihat bahwa kualitas angkatan kerja di daerah perkotaan lebih baik dibanding di daerah perdesaan. Pada tahun 2019, persentase angkatan kerja di daerah perkotaan yang berpendidikan menengah ke atas lebih tinggi dari yang tinggal di daerah perdesaan dengan jenjang pendidikan yang sama. Persentase angkatan kerja di daerah perkotaan dengan jenjang menengah ke atas mencapai 51,62 persen, sedangkan persentase angkatan kerja di daerah perdesaan dengan jenjang pendidikan yang sama hanya sebesar 28,69 persen. Secara lebih rinci, perbedaan paling nyata terletak di jenjang pendidikan tinggi di mana untuk wilayah perkotaan sebesar 20,56 persen sedangkan wilayah perdesaan sebesar 9,05 persen.

**Tabel 1.2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Gorontalo, 2017-2019**

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018	2019
Pertanian	173.899	167.142	172.483
Industri	41.673	111.405	89.856
Jasa	308.744	276.986	299.748

Sumber : Gorontalo Dalam Angka, 2020

Menurut lapangan pekerjaan utama, dari jumlah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo, pekerja yang bekerja di sektor jasa masih mendominasi, dari total tenaga kerja sebanyak 308.744 orang di tahun 2017, menurun menjadi 276.986 orang di tahun 2018 dan di tahun 2019 menjadi 299.748 orang. Sementara sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Provinsi Gorontalo, jumlah tenaganya di tahun 2017 sebanyak 173.899 orang, menurun di tahun 2018 hanya sebanyak 167.742 orang dan di akhir tahun 2019 menjadi 172.483 orang. Sementara itu, untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, 41.673

orang di tahun 2017, meningkat di tahun 2018 menjadi 111.405 orang dan di akhir tahun 2019 sebanyak 89.856 orang.

Bila mencermati data di atas, maka tenaga kerja di Provinsi Gorontalo paling banyak bekerja di sektor jasa kemudian sektor pertanian dan terakhir pekerja yang bekerja di sektor industri. Sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Provinsi Gorontalo menempati urutan kedua terbanyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo menjadi *urgent* untuk ditelaah lebih mendalam sehingga penulis mengangkat topik penelitian tentang ***Faktor-faktor Pendorong Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Gorontalo.***

1.2. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Seberapa besar pengaruh kontribusi sektor pertanian terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo?
2. Seberapa besar pengaruh belanja pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo?
4. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo?
5. Seberapa besar pengaruh kemiskinan terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui besaran pengaruh kontribusi sektor pertanian terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.
2. Mengetahui besaran pengaruh belanja pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.
3. Mengetahui besaran pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.
4. Mengetahui besaran pengaruh tingkat pendidikan tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.

5. Mengetahui besaran pengaruh kemiskinan terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua aspek, yaitu :

1. Manfaat praktis, Bagi pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah serta meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo.
2. Manfaat Teoretis, Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan pendorong produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.